

EVALUASI KESIAPAN SEKOLAH REGULER DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI ERA KURIKULUM MERDEKA

Maria Gibtia ^{*1}
Meita Sulastri²
Ichsan Fauzi Rachman ³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi

*e-mail: 243403111177@student.unsil.ac.id¹, 243403111178@student.unsil.ac.id²,
ichsanfauzirachman@unsil.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sekolah reguler dalam menerapkan pendidikan inklusi di era Kurikulum Merdeka. Pendidikan inklusi bertujuan agar semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, bisa belajar bersama di sekolah yang sama dengan dukungan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber terpercaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesiapan sekolah masih beragam, terutama dalam hal fasilitas, kompetensi guru, serta dukungan dari lingkungan sekolah. Beberapa sekolah sudah memiliki sarana dasar dan guru pendamping, namun belum semuanya memiliki pelatihan khusus atau fasilitas yang ramah untuk siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, sikap dan kebiasaan di lingkungan sekolah juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan inklusi. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan guru, penyediaan fasilitas pendukung, serta kerja sama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mendukung pendidikan inklusi yang merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Pendidikan Inklusi, Sekolah Reguler

Abstract

This study aims to determine the extent to which regular schools are ready to implement inclusive education in the Merdeka Curriculum era. Inclusive education aims to enable all students, including those with special needs, to learn together in the same school with appropriate support. This research uses a qualitative approach with a literature study method from various trusted sources. The results of the study show that school readiness still varies, especially in terms of facilities, teacher competence, and support from the school environment. Some schools already have basic facilities and accompanying teachers, but not all of them have special training or facilities that are friendly to students with special needs. In addition, attitudes and habits in the school environment also have a big influence on the success of inclusive education. Therefore, teacher training, provision of supporting facilities and cooperation between schools, parents and the government are needed to support equitable and sustainable inclusive education.

Keywords: Independent Curriculum, Inclusive Education, Regular School

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan yang menekankan pemberian kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Di Indonesia, konsep pendidikan inklusi semakin mendapat perhatian serius, terutama sejak diberlakukannya Kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi setiap siswa, sehingga diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik secara lebih efektif, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial (Kemdikbud, 2022). Namun, keberhasilan penerapan pendidikan inklusi di

sekolah reguler tidak hanya bergantung pada kebijakan kurikulum semata, melainkan juga pada kesiapan sekolah secara menyeluruh, mulai dari sarana prasarana yang memadai, kompetensi sumber daya manusia, hingga lingkungan belajar yang inklusif dan suportif.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor kunci dalam mendukung proses pembelajaran inklusif. Fasilitas yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas ruang kelas, toilet khusus, serta alat bantu belajar, sangat menentukan kenyamanan dan efektivitas belajar siswa berkebutuhan khusus (Oktaviani et al., 2024). Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, terutama guru yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus dalam pendidikan inklusi, menjadi aspek krusial yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga mampu menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan karakteristik siswa (Sari & Pujiastuti, 2023). Di sisi lain, implementasi Kurikulum Merdeka yang mengedepankan kemerdekaan belajar dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sekolah reguler dalam mengintegrasikan pendidikan inklusi secara optimal. Sekolah harus mampu menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar inklusif bagi semua siswa tanpa terkecuali.

Namun demikian, sejumlah hambatan dan tantangan masih kerap dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di era Kurikulum Merdeka. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi guru, serta rendahnya pemahaman dan dukungan dari lingkungan sekolah dan orang tua terhadap keberagaman kebutuhan siswa (Aeny et al., 2022). Hambatan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pendidikan inklusi yang sebenarnya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang adil, ramah, dan memberdayakan seluruh peserta didik.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sekolah reguler dalam menerapkan pendidikan inklusi di era Kurikulum Merdeka menjadi sangat penting. Evaluasi ini akan menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia, implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks inklusi, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusi yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui artikel ini, penulis berupaya memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pendidikan inklusif yang mampu menjawab kebutuhan seluruh anak bangsa sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka dan nilai-nilai Pancasila.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Studi literatur ini dilakukan dengan cara menganalisis beberapa sumber

seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan pembahasan yaitu evaluasi kesiapan sekolah reguler dalam menerapkan pendidikan inklusi di era Kurikulum Merdeka.

Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber data. Proses penelusuran ini dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci antara lain “pendidikan inklusi,” “kurikulum merdeka,” dan “sekolah reguler.” Penggunaan kata kunci tersebut bertujuan untuk menyaring literatur yang relevan, sehingga data yang dianalisis menjadi lebih spesifik dan sesuai tujuan penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu agar lebih berkualitas dan isinya sesuai dengan topik yang dibahas. Kriteria tersebut antara lain literatur harus relevan dengan topik penelitian, artinya isi pembahasannya berkaitan langsung dengan pendidikan inklusi dan Kurikulum Merdeka. Selain itu, literatur yang dipilih harus memuat hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, literatur yang digunakan diambil dari jurnal, artikel terpercaya dan buku-buku akademik.

Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema, pola dan konsep. Setelah data dianalisis, hasilnya dirangkum dan disusun secara sistematis untuk kemudian dibahas lebih lanjut di bagian hasil dan pembahasan. Dengan cara ini, penelitian bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di kurikulum merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai atau sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Pendidikan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus aksesibel atau mudah diakses serta mendukung proses pembelajaran bagi semua peserta didik, terutama untuk anak berkebutuhan khusus yang cara belajar dan adaptasinya berbeda dari yang lain, perlunya perlakuan khusus (Kustawan, 2012).

Penelitian Aminulloh et al. (2024) kepada dua sekolah dasar di Kabupaten Pacitan menyatakan kesiapan sarana dan prasarana mencapai 62,5% yang dapat dikategorikan sebagai “siap”, tersedia ruang belajar, perpustakaan, alat peraga dan media belajar. Tidak adanya fasilitas aksesibilitas seperti alat bantu dengar, jalur kursi roda dan toilet khusus menunjukkan belum optimalnya kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung hak-hak ABK. Suvita et al. (2022) pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Garut menyatakan bahwa sekolah tersebut lebih mendalam kelengkapan dan pemanfaatan. Tersedia sarana umum sekolah, juga menyediakan papan bilangan, balok bilangan dan box konsentrasi untuk mendukung proses pembelajaran ABK. Sekolah ini juga memperhatikan manajemen pengadaan dan pemeliharaan sarana. Namun

terdapat keterbatasan dalam aspek aksesibilitas sumber belajar. Dapat disimpulkan tingkat kesiapan sarana dan prasarana di sekolah ini termasuk “cukup matang”. Irawan et al. (2022) pada sekolah menengah atas di Mataram yang dinilai cukup representatif dalam mengelola layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Tersedia ruang pengelola pendidikan inklusi, buku braille, Al-Quran braille, alat peraga, alat musik, alat olahraga dan infrastruktur seperti jalan timbul, dan rel pegangan (railing) memudahkan aktivitas siswa difabel. Adanya pengorganisasian khusus pengelola pendidikan inklusif yang memastikan sarana dan prasarana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan terjaga. Namun, sekolah ini belum ada GPK.

Analisis ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusi di Indonesia belum merata, namun tetap mengalami perkembangan. Oleh karena itu, penguatan sarana dan prasarana pendidikan inklusi harus ditingkatkan lagi, tidak hanya soal kelengkapan tetapi juga pemanfaatan, dan pengelolaan yang sesuai supaya aktivitas pembelajaran untuk ABK berjalan dengan optimal.

B. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari hasil analisis beberapa artikel menunjukan bahwa pentingnya faktor sumber manusia untuk menentukan kesuksesan implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler. Dalam penelitian Aminulloh et al. (2024) menggambarkan keadaan dua sekolah dasar yang memiliki guru kelas, guru pendidikan inklusi, dan guru pendamping khusus. Namun ketersediaan itu belum menunjukkan kesiapan sumber daya manusia yang memadai karena Sebagian besar belum mendapatkan pendidikan luar biasa dan belum mengikuti pelatihan khusus untuk memahami dan memenuhi kebutuhan ABK. Kondisi ini berarti memperlihatkan bahwa secara kuantitatif sumber daya manusia memang sudah terpenuhi, namun belum siap menghadapi tantangan pendidikan inklusi dari segi kualitas SDM.

Sementara itu, hasil penelitian Suvita et al. (2022) menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sumber daya manusia pada sekolah yang diteliti memiliki guru bimbingan konseling yang pemahamannya lebih baik terhadap ABK dalam memahami karakteristik mereka dan terlibat secara nyata dalam mendampingi siswa. Kesiapan SDM dalam penelitian ini juga mencerminkan upaya kerja sama antara guru, orang tua, dan tim manajemen sekolah dalam menyusun pengayaan sarana, penggunaan media pembelajaran, dan penanganan pada siswa. Kondisi tersebut berarti kesiapan SDM pendidikan inklusi cukup baik, melalui pelatihan non formal guru menunjukkan sikap positif dalam mendampingi siswa ABK.

Dalam penelitian Irawan et al. (2022) ketersediaan SDM menjadi hal utama yang perlu diperhatikan karena sekolah yang diteliti tidak memiliki guru pendamping khusus (GBK). Namun, sekolah tersebut telah berupaya dalam bentuk mengangkat guru umum menjadi guru inklusif yang melalui pelatihan mendalam selama satu tahun. Meskipun solusi ini dinilai dapat

menyesuaikan, tetapi tetap perlunya pelatihan berkelanjutan agar guru lebih siap dalam menghadapi keberagaman dari kebutuhan dan kondisi ABK.

Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa kesiapan SDM dalam pendidikan inklusi masih beragam. Guru dan GPK yang tersedia masih banyak yang tidak melalui pelatihan khusus. Dan tidak adanya GPK yang diatasi dengan melalui pelatihan guru secara intensif selama satu tahun untuk dapat menghadapi pendidikan inklusi. Secara keseluruhan kesiapan SDM dalam jumlah sudah hampir memenuhi, tetapi perlu dikembangkan dari aspek kompetensi, dan pelatihan khusus. Penyelenggara pendidikan inklusi memerlukan guru pendidikan khusus untuk menangani hambatan belajar pada ABK (Oktavianingsih, 2023).

C. Implementasi Pada Kurikulum Merdeka

Implementasi pendidikan inklusi dalam Kurikulum Merdeka merupakan langkah konkret untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Kurikulum ini memberi keleluasaan kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dalam praktiknya, inklusi tidak hanya soal menerima siswa ABK, tetapi juga memastikan proses belajar mengakomodasi keberagaman, baik melalui strategi pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran individual (PPI), maupun penilaian yang adaptif (Marlina, 2024; Amany, 2022).

Salah satu bentuk implementasi yang utama adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi ini mendorong guru menyesuaikan materi, proses, dan produk belajar sesuai kemampuan, minat, dan karakter siswa. Untuk siswa ABK, pendekatan ini memungkinkan mereka tetap aktif belajar bersama teman-temannya dengan materi atau tugas yang disesuaikan tanpa mengurangi nilai edukatifnya (Marlina, 2024). Selain itu, penyusunan PPI menjadi bagian penting yang memungkinkan guru, orang tua, dan jika ada, Guru Pembimbing Khusus (GPK), menyusun tujuan belajar yang realistis dan bermakna sesuai kondisi siswa (Amany, 2022).

Dari sisi asesmen, Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan asesmen yang fleksibel, seperti asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, yang difokuskan pada pertumbuhan belajar individu, bukan perbandingan antar siswa. Hal ini diperkuat dengan penggunaan rubrik penilaian yang selaras dengan indikator-indikator dalam PPI, sehingga lebih mencerminkan perkembangan holistik siswa ABK (Mazaya, 2023). Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, permainan peran, dan metode interaktif lainnya dapat digunakan dengan penyesuaian, seperti bantuan visual atau bimbingan individual, agar semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif.

Kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar yang menyediakan modul pelatihan, contoh praktik baik, dan panduan pembelajaran inklusif. Namun, kesuksesan implementasi pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan sekolah untuk menerapkannya secara nyata. Sekolah yang aktif menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan humanis akan lebih berhasil mendukung

siswa ABK, sedangkan sekolah yang masih mempertahankan pendekatan seragam akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusi adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak dalam ekosistem pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah (Mazaya, 2023; Amany, 2022).

D. Hambatan dan Tantangan

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah reguler menjadi upaya penting untuk mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum Merdeka membuka peluang melalui prinsip diferensiasi dan fleksibilitas pembelajaran, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan sistemik dan teknis. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Banyak guru belum memiliki keterampilan pedagogis dan pemahaman psikologis yang memadai, termasuk dalam menyusun asesmen serta strategi pembelajaran inklusif (Ratri & Herawati, 2024; Andriyana et al., 2023). Ketiadaan Guru Pendamping Khusus (GPK) di sebagian besar sekolah reguler membuat guru kelas harus merangkap peran tersebut tanpa pelatihan yang memadai, sehingga dukungan terhadap PDBK menjadi tidak optimal (Ratri & Herawati, 2024).

Selain sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala signifikan. Fasilitas fisik seperti jalur kursi roda, toilet khusus, serta media pembelajaran adaptif masih belum tersedia di banyak sekolah reguler (Susanti & Herawati, 2024). Ketiadaan aksesibilitas ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak dan kenyamanan belajar bagi siswa disabilitas. Padahal, lingkungan fisik yang ramah disabilitas merupakan prasyarat penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan setara bagi semua peserta didik.

Dari sisi kurikulum, meskipun Kurikulum Merdeka memberi ruang untuk penyesuaian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan. Modifikasi kurikulum, baik dari segi materi, metode, maupun evaluasi untuk PDBK, masih sangat terbatas karena kecenderungan sekolah untuk menyeragamkan pembelajaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual siswa (Susanti & Herawati, 2024; Andriyana et al., 2023). Di sisi lain, stigma sosial dan resistensi terhadap kehadiran siswa inklusi di kelas reguler memperlihatkan bahwa nilai-nilai inklusif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya sekolah (Winata, 2024; Andriyana et al., 2023), sehingga menghambat proses integrasi yang seharusnya berjalan secara alami.

Tak kalah penting, lemahnya dukungan sistemik dari pemerintah dan pemangku kebijakan turut memperlambat efektivitas implementasi pendidikan inklusi. Meski regulasi seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2016 telah diterbitkan, pengawasan dan pelaksanaannya di tingkat sekolah masih jauh dari optimal (Yunus et al., 2023). Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusi di era Kurikulum Merdeka memerlukan intervensi menyeluruh dari aspek kebijakan, pemberdayaan SDM, penguatan infrastruktur,

hingga pembentukan budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Tanpa kesiapan yang matang di seluruh lini, hambatan implementasi pendidikan inklusi akan terus berulang di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kesiapan sekolah reguler dalam menerapkan pendidikan inklusi di era Kurikulum Merdeka masih berada pada tingkat yang bervariasi. Sebagian sekolah telah menunjukkan kemajuan, seperti tersedianya beberapa fasilitas dan adanya guru pendamping, namun secara umum masih ditemukan keterbatasan, terutama dalam hal pelatihan guru, fasilitas aksesibel, serta pemahaman menyeluruh mengenai pendekatan inklusif. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis seperti sarana dan SDM, tetapi juga bergantung pada dukungan budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai inklusif. Implementasi Kurikulum Merdeka memang memberi ruang fleksibilitas, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam menerjemahkan prinsip-prinsip inklusi ke dalam praktik nyata di kelas dan lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeny, A. N., Rahmadhani, L. W., Azzahra, S. M., & Santoso, G. (2022). *Analisis dan evaluasi: Program pendidikan inklusi melalui sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 1(3), 210-223. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/495/250>
- Aminulloh, A., Kustiono, K., & Maslikhah, L. (2024). *Kesiapan sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusi Kabupaten Pacitan wilayah timur*. Scholarly Journal of Elementary School (SJES), 4(1), 58-69. <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/sjes>
- Andriyana, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2023). *Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya*. Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan, 5(2), 94-106. <https://journal.uad.ac.id/index.php/Psikologi/article/view/27332/12308>
- Irawan, M. A., Ridlo, M. R., & Muslim, A. (2022). *Manajemen strategik pendidikan inklusif sekolah menengah atas*. Journal of Administration and Educational Management, 5(1), 18-27. <https://repository.uir.ac.id/19125/11/Alignment%201.pdf>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemdikbudristek. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan inklusif & upaya implementasinya: Pedoman teknis penyelenggaraan Permendiknas No. 70 tahun 2009*. Jakarta: PT Luxima Metro Media.
- Oktaviani, L., Gunarsih, D., Awaludin, J., & Supriyatin. (2024). *Analisis implementasi kurikulum merdeka pada sekolah inklusi di sekolah menengah pertama Kota Tangerang*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 6(2), 45-58. <https://edukatif.org/edukatif/article/view/6473>

- Oktavianingsih, E., & Adhani, D. N. (2023). *Pendidikan anak berkebutuhan khusus*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI. (2024, Maret). *Isu Sepekan IV: Transformasi pendidikan Indonesia – Integrasi Kurikulum Nasional dan Pendidikan Inklusif*. Sekretariat Jenderal DPR RI. <https://pusaka.dpr.go.id/produk/isu-sepekan>
- Ratri, T. M., & Herawati, N. I. (2024). *Implementasi pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah reguler Kota Bandung*. Jurnal Lensa Pendas, 9(1), 96–109. <https://jurnal.umkuningan.ac.id/index.php/lensapendas/issue/view/165>
- Sari, F., & Pujiastuti, H. (2023). *Evaluasi efektivitas kurikulum inklusi dan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa dengan kebutuhan khusus*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8(3), 112-127. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/11269/4853>
- Susanti, T., & Herawati, N. I. (2024). *Implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti, 2(1), 64–74. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jpicb/issue/view/82>
- Suvita, Y., Manullang, T. I. B., Sunardi, & Supriatna, M. (2022). *Kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif*. Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus, 6(2), 155-164. <https://jpkk.ppj.unp.ac.id/index.php/jpkk/issue/view/16>